



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MEWUJUDKAN TRANSFORMASI BERAGAMA

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Saat ini postur Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengalami perubahan, di mana sejumlah bidang yang semula berada di bawah payung Kemenag RI kini bergeser langsung di bawah Presiden, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH). Kondisi ini menjadi hal yang lumrah dilakukan mengingat Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan diperkenankan melakukan perubahan formasi kelembagaan di setiap kementerian. Adapun perubahan status kelembagaan tersebut harus segera diikuti dengan melakukan perubahan sejumlah aturan hukum. Misalnya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya mengenai kedudukan BPJPH dan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pascapenarikan dua sektor dari postur Kemenag RI langsung di bawah koordinasi Presiden menjadikan kementerian ini fokus pada dua sektor penting, yakni urusan pendidikan keagamaan dan bimbingan masyarakat beragama yang semuanya menjadi area substansial. Bidang pendidikan keagamaan masuk dalam program kerja Astacita 4 pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni memperkuat sumber daya manusia (SDM). Sejalan dengan hal tersebut, bidang ini menjadi penting untuk dikelola Kemenag RI dalam penguatan SDM unggul yang didasari pada nilai-nilai agama. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat yang menjadi bagian dari struktur Kemenag RI juga menjadi instrumen penting dalam memfasilitasi keberagaman masyarakat Indonesia. Peran negara dalam melakukan bimbingan terhadap pemeluk umat beragama dimaknai sebagai komitmen negara dalam memberikan jaminan terhadap kebebasan warga negara dalam memeluk agama dan kepercayaannya. Untuk itu negara berkewajiban memfasilitasi warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya dengan baik.

Hal inilah yang mendasari bahwa transformasi beragama menjadi agenda mendesak yang harus dilakukan oleh Kemenag RI. Mengingat tantangan kehidupan beragama tidak saja sekedar soal moderasi dalam beragama namun tak kalah penting juga diperlukan adanya kebutuhan akan transformasi beragama dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Agama dipandang perlu ditempatkan sebagai instrumen pemantik untuk mentransformasikan kehidupan individu dan sosial, baik di ruang publik maupun privat. Bukannya tanpa sebab mengingat agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena agama memberikan sebuah sistem nilai yang memiliki derivasi pada norma-norma masyarakat untuk memberikan pengabsahan dan pembenaran dalam mengatur pola perilaku masyarakat.

Beragamnya persoalan yang terjadi di tengah masyarakat seperti judi *online*, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, hingga korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) perlu menjadi perhatian bersama. Pada titik ini, agama perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting dalam menjawab berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengubah transformasi kelembagaan di Kemenag RI dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan agama sebagai faktor pemantik dalam mentransformasikan kehidupan masyarakat ke dalam situasi yang lebih baik.

Atensi DPR

Transformasi beragama menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai manifestasi dari nilai-nilai ketuhanan sebagaimana disebutkan di dalam Pancasila. Oleh karena itu, sebagai *leading* sektor, Kemenag RI diharapkan dapat mewujudkan transformasi beragama melalui berbagai narasi dan program dalam rangka mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Terkait dengan hal tersebut, melalui rapat kerja dengan pemerintah, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kemenag RI untuk memberikan perhatian khusus terhadap wacana tersebut. Tidak hanya itu, Komisi VIII DPR RI dapat meminta pemerintah, lembaga pendidikan, serta komunitas agama untuk bekerja sama dalam memperkuat dan mewujudkan transformasi beragama.

Sumber

uinjkt.ac.id, 19 November 2024;
Kompas, 20 November 2024.

Minggu ke-3 November
(18 s.d. 24 November 2024)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024